



Research Article

Penilaian Risiko dan Aktivitas Pengendalian pada Pengelolaan Dana Pembangunan Waduk Lambo: Evaluasi Berbasis SPIP

Susana Purnamasari Baso

1. Universitas Katolik Widya Mandira, Indonesia; Purnamabaso@gmail.com 

Copyright © 2025 by Authors, Published by **INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 19, 2024
Accepted : October 14, 2025

Revised : September 21, 2025
Available online : November 17, 2025

How to Cite: Susana Purnamasari Baso. (2025). Risk Assessment and Control Activities in the Management of Lambo Reservoir Development Funds: SPIP-Based Evaluation. *Public Policy: Jurnal Ilmu Sosial Dan Kebijakan*, 2(2), 213–221. <https://doi.org/10.61166/policy.v2i2.36>

Risk Assessment and Control Activities in the Management of Lambo Reservoir Development Funds: SPIP-Based Evaluation

Abstract. This study evaluates the compliance of risk assessment and control activities within the Government Internal Control System (SPIP) in managing the Lambo Reservoir development funds at BWS NT II with Government Regulation No. 60 of 2008, identifies the inhibiting factors, and formulates improvement strategies. Using a qualitative approach through interviews and observations with employees and affected communities, supported by project documents, financial reports, news sources, and regulations, the study assesses five SPIP components: control environment, risk assessment, control activities, information communication, and monitoring. The results show that SPIP implementation is not yet optimal, particularly in the absence of comprehensive risk mapping—such as risks of delayed payments, land disputes/validity issues, and potential fund misuse along with inconsistent application of control procedures like land document verification, segregation of duties,

reconciliations, and periodic audits, as well as inadequate transparency and public outreach that contribute to distrust. Key obstacles include incomplete or outdated land data, weak inter-agency coordination, limited human and technological resources, and geographical logistical challenges. The recommended improvements include forming an integrated land validation team with the National Land Agency, digitizing documents and implementing case tracking, strengthening key controls through multi-layer verification, real-time reconciliation, and periodic risk-based audits, enhancing public outreach and complaint channels, and improving project monitoring and logistical support to provide a roadmap for strengthening SPIP effectiveness and ensuring accountable and timely project completion.

Keywords: SPIP, Risk Assessment, Control Activities, Lambo Reservoir, Accountability, Transparency.

Abstrak. Penelitian ini mengevaluasi kesesuaian penerapan penilaian risiko dan aktivitas pengendalian dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada pengelolaan dana pembangunan Waduk Lambo di BWS NT II terhadap PP No. 60 Tahun 2008, mengidentifikasi faktor penghambatnya, serta merumuskan strategi perbaikannya. Pendekatan kualitatif digunakan melalui wawancara dan observasi terhadap pegawai serta masyarakat terdampak, dilengkapi dokumen proyek, laporan keuangan, berita, dan regulasi. Evaluasi mencakup lima komponen SPIP: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi-komunikasi, dan pemantauan. Hasil menunjukkan penerapan SPIP belum optimal, terutama pada: (1) penilaian risiko—belum ada pemetaan menyeluruh atas risiko keterlambatan pembayaran, sengketa/validitas lahan, dan penyalahgunaan dana; (2) aktivitas pengendalian—prosedur verifikasi dokumen lahan, segregation of duties, rekonsiliasi dan audit berkala belum konsisten; serta (3) informasi-komunikasi—transparansi dan sosialisasi belum memadai sehingga memicu ketidakpercayaan publik. Faktor penghambat utama meliputi ketidaklengkapan/ketidaktuntutan data lahan, koordinasi lintas-instansi yang lemah, keterbatasan SDM dan TI, serta tantangan geografis-logistik. Rekomendasi kunci: pembentukan tim validasi lahan terpadu (dengan BPN), digitalisasi berkas dan case tracking, penguatan pengendalian kunci (tiga-lapis verifikasi, rekonsiliasi real-time, audit berkala berbasis risiko), peningkatan sosialisasi dan kanal pengaduan, serta penguatan pemantauan proyek dan dukungan logistik. Temuan ini memberi peta jalan peningkatan efektivitas SPIP untuk memastikan akuntabilitas dan ketepatan waktu proyek.

Kata Kunci: SPIP, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Waduk Lambo, Akuntabilitas, Transparansi.

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana publik pada Proyek Strategis Nasional Waduk Lambo membutuhkan akuntabilitas dan transparansi sesuai PP No. 12/2019 dan penguatan SPIP (PP No. 60/2008). Proyek oleh Kementerian PUPR/BWS NT II ini ditujukan untuk irigasi, pengendalian banjir, dan penyediaan air bersih di Kabupaten Nagekeo. Namun, pada ranah pembayaran ganti rugi lahan, data menunjukkan masih terdapat gap tata kelola yang relevan untuk ditangani melalui penilaian risiko dan aktivitas pengendalian SPIP.

Data kunci pengadaan lahan (ringkasan temuan)

- Rencana awal: 555 bidang (2.820.478 m²), nilai ganti rugi Rp 233,35 miliar (sumber: surat Dirut LMAN → Dirut SSPSDA; florespos.net, 2022).
- Pengajuan efektif: 547 bidang; disetujui 357; terealisasi dibayar 346; belum dibayar 99 bidang. Ketidaksesuaian rencana–realisasi menimbulkan kebingungan dan potensi sengketa administrasi.
- Rekap tahapan (versi pembaruan 2025):

- Tahap I: diajukan 134; disetujui 90; dibayar 82; 8 belum dibayar; dibayar Rp 32,60 M; belum Rp 5,79 M; luas 585.861 m².
- Tahap II: diajukan 267; disetujui 219; dibayar 164; 55 belum dibayar; dibayar Rp 56,18 M; belum Rp 13,41 M; luas 1.057.602 m².
- Tahap III: diajukan 38; disetujui 36; dibayar 33; 3 belum; dibayar Rp 22,62 M; belum Rp 1,58 M; luas 544.467 m².
- Tahap IV: diajukan 46; disetujui 38; seluruhnya dibayar; Rp 15,63 M; luas 351.308 m².
- Tahap V: diajukan 62; disetujui “-”; dibayar 29; 33 belum; dibayar Rp 10,95 M; belum Rp 17,40 M; luas 281.240 m².
- Total (tahap I-V): diajukan 547; disetujui 383; dibayar 346; 99 belum; dibayar Rp 137,98 M; belum Rp 38,19 M; luas 2.820.478 m².
- Tambahan (belum tahap): 210 bidang (± 215.000 m²) berpotensi menambah kewajiban Rp 10,59 M.

Implikasi terhadap SPIP (fokus penilaian risiko & aktivitas pengendalian)

- Penilaian Risiko:
 1. Keterlambatan pembayaran (99 bidang; Rp 38,19 M tertahan) berisiko memicu ketidakpercayaan publik dan eskalasi sengketa.
 2. Validitas/keabsahan dokumen (ketidaksesuaian data pemilik, masalah waris, bidang “tambahan”) meningkatkan risiko pembayaran salah sasaran.
 3. Integritas data lintas-instansi (LMAN-BPN-BWS NT II) yang belum sinkron menimbulkan risiko duplikasi/omisi.
 4. Paparan fraud: laporan investigatif dan temuan pemeriksaan (mis. nama fiktif/duplikasi bidang) mengindikasikan risiko penyimpangan jika kontrol kunci tidak ditegakkan.
- Aktivitas Pengendalian (perlu penguatan terarah):
 1. Verifikasi berlapis (BWS NT II-BPN-Pemda) atas dokumen kepemilikan/waris sebelum pembayaran; *blacklist* anomali (nama fiktif/duplikasi).
 2. Pemisahan fungsi & rekonsiliasi periodik (data bidang-nilai-status pembayaran) berbasis *case tracking* digital.
 3. Audit berbasis risiko per tahap (prioritas: Tahap II & V yang menyisakan 55 dan 33 bidang) serta monitoring progres T+30/T+60.
 4. SOP sengketa & kanal pengaduan terukur (SLA penanganan) untuk menjaga akuntabilitas dan meredakan konflik.
 5. Manajemen logistik-lapangan (akses, jadwal ukur bersama, temu pemilik) untuk menekan *bottleneck* geografis.

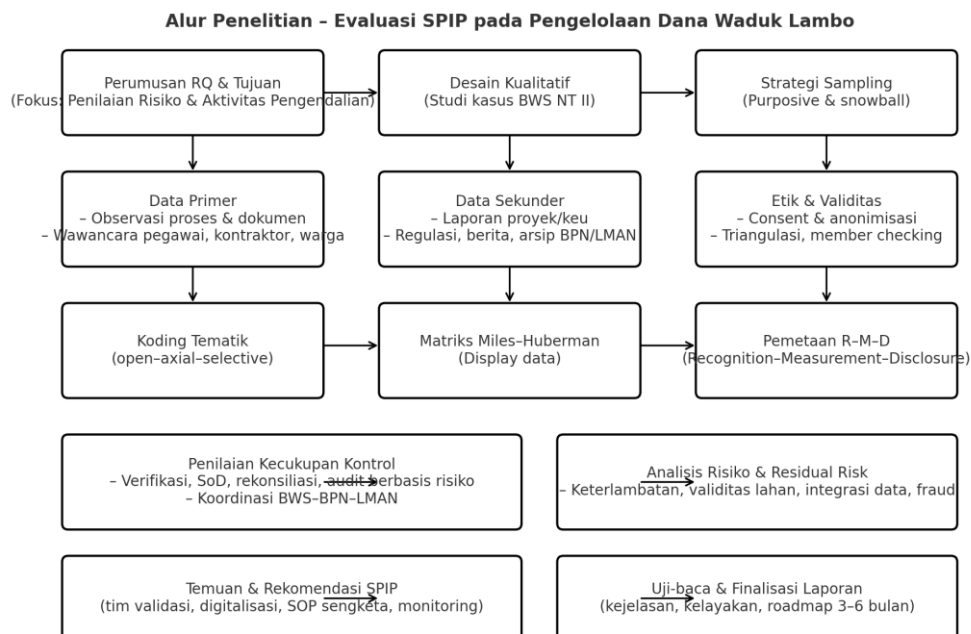
Dari data diatas ditemukan gap antara aturan dan pelaksanaan di level data, proses, dan koordinasi—tercermin dari 99 bidang belum terbayar (Rp 38,19 M) dan 210 bidang tambahan yang berpotensi jadi kewajiban baru. Karena itu, penelitian memfokuskan evaluasi SPIP pada penilaian risiko dan aktivitas pengendalian sebagai tuas utama untuk memulihkan ketepatan, transparansi, dan kepercayaan publik dalam pengelolaan dana Waduk Lambo. Tujuan dari penelitian ini Adalah meningkatkan efektivitas SPIP pada pengelolaan dana ganti rugi Proyek Waduk

Lambo melalui penguatan penilaian risiko dan aktivitas pengendalian agar lebih akuntabel, transparan, dan tepat waktu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berfokus pada evaluasi SPIP (PP 60/2008) dalam pengelolaan dana Waduk Lambo, dengan penekanan pada penilaian risiko dan aktivitas pengendalian. Unit analisis yakni proses pengelolaan ganti rugi lahan pada BWS NT II dan Subjek penelitian yakni pegawai BWS NT II, kontraktor, BPN/LMAN, dan warga terdampak. Penentuan informan menggunakan teknik purposive dan snowball. Data menggunakan data Primer yang dikumpulkan dengan cara observasi proses & dokumen; wawancara semi-terstruktur. Kemudian menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari laporan proyek/keuangan; regulasi; berita; arsip BPN/LMAN.

Gambar 1. Alur penelitian (ringkas)



HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Konsolidasi Data

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada pengelolaan dana ganti rugi lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) Waduk Lambo oleh BWS NT II dengan fokus pada dua komponen inti: penilaian risiko dan aktivitas pengendalian. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi terbatas; data sekunder dihimpun dari dokumen resmi (surat LMAN-SSPSDA), laporan proyek/keuangan, regulasi, serta pemberitaan resmi. Konsolidasi data menunjukkan adanya selisih antara rencana dan realisasi pembayaran lahan:

dari 555 bidang rencana awal ($\pm 2.820.478 \text{ m}^2$; $\pm \text{Rp } 233,35$ miliar), 547 bidang diajukan, 383 disetujui, 346 telah dibayar, dan 99 bidang belum dibayar dengan nilai $\pm \text{Rp } 38,19$ miliar. Selain itu, terdapat 210 bidang tambahan ($\pm 215.000 \text{ m}^2$) yang belum masuk tahap pembayaran dan berpotensi menambah kewajiban $\pm \text{Rp } 10,59$ miliar. Titik kritis keterlambatan terutama berada pada Tahap II (55 bidang) dan Tahap V (33 bidang). Secara umum, angka-angka ini mengindikasikan adanya kesenjangan administrasi-verifikasi dan koordinasi lintas-instansi yang berdampak pada keterlambatan penyelesaian kewajiban kepada masyarakat.

Hasil Penilaian Risiko

1) Kelengkapan dan keabsahan dokumen lahan.

Proses verifikasi menemukan ketidaksesuaian identitas pemilik, dokumen waris yang belum lengkap, serta potensi duplikasi bidang. Ketidakselarasan data antar BWS-BPN-LMAN memanjangkan lead time verifikasi dan mengerek residual risk pada titik pembayaran.

2) Risiko sosial dan legitimasi.

Keterlambatan pembayaran atas 99 bidang memicu ketidakpercayaan, spekulasi, dan resistensi sebagian warga. Ketika informasi tidak tersampaikan merata, persepsi maladministrasi meningkat, memperbesar peluang sengketa.

3) Risiko integritas proses.

Inkonsistensi data membuka celah pembayaran salah sasaran/berulang, terutama ketika kontrol pencegahan (preventive) belum sepenuhnya digital dan interoperable.

4) Risiko operasional-logistik.

Keterlambatan pembayaran di lokasi strategis berimbas langsung pada critical path konstruksi (akses alat, pengiriman material), menunda pekerjaan di titik yang saling bergantung.

Secara metodologis, identifikasi risiko sudah dilakukan (daftar risiko, analisis penyebab, dan konsekuensi), namun pemutakhiran peta risiko (risk register) belum berjalan roll-ing per tahap. Indikator dini (*early warning indicators*)—misalnya presentase berkas tidak lengkap, waktu siklus verifikasi per bidang, jumlah sengketa aktif, dan rasio koreksi data—belum dimanfaatkan sebagai pemicu otomatis pengendalian tambahan (escalation trigger). Akibatnya, kendali tidak selalu mengiringi dinamika risiko di lapangan.

Hasil Aktivitas Pengendalian

1) Verifikasi dan otorisasi.

BWS NT II menerapkan verifikasi berlapis pada dokumen lahan, tetapi proses masih bertumpu pada *checklist* manual dan konfirmasi berulang lintas-instansi. Ketiadaan *single source of truth* menaikkan beban administratif, menunda otorisasi, dan memperbesar *rework*.

2) Pemisahan fungsi (SoD) dan rekonsiliasi.

SoD telah diterapkan (unit teknis–keuangan–validasi), tetapi rekonsiliasi status bidang–nominal–dokumen belum real-time antar BWS-BPN-LMAN.

Ini menyebabkan perbedaan status “dibayar/belum” pada waktu berbeda di masing-masing basis data.

3) Audit dan tindak lanjut.

Audit internal dan eksternal berjalan, namun konsistensi tindak lanjut rekomendasi belum merata. *Risk-based audit* per tahap (terutama Tahap II dan V) masih perlu ditajamkan agar selaras dengan profil risiko aktual.

4) Inspeksi lapangan dan kendali operasional.

Kontraktor melakukan inspeksi harian untuk menjaga mutu dan keselamatan. Akan tetapi, bottleneck logistik (akses jalan belum memadai, ketergantungan antarlokasi) membuat sebagian pekerjaan menunggu penyelesaian pembayaran di titik hulu.

5) Komunikasi dan sosialisasi.

Informasi publik terkait alur, jadwal, dan status pembayaran belum tersebar merata. Keterbatasan kanal komunikasi menimbulkan kesenjangan pemahaman dan memperbesar jarak kepercayaan.

Secara keseluruhan, desain kontrol sudah tersedia, tetapi kinerja kontrol melemah pada aspek integrasi data, digitalisasi alur, dan standarisasi SLA (service level agreement) penyelesaian sengketa/pembayaran. Dengan kata lain, *policy-to-practice gap* masih tampak pada tahapan implementasi dan koordinasi.

Kepatuhan terhadap PP No. 60 Tahun 2008

Pemetaan terhadap komponen SPIP menunjukkan:

- Sesuai/relatif memadai: identifikasi & analisis risiko (awal), prosedur verifikasi dokumen, audit internal-eksternal, inspeksi lapangan, dan koordinasi teknis dengan BPN.
- Belum optimal: ketepatan waktu pembayaran ganti rugi, pemerataan informasi ke masyarakat, mekanisme sengketa (SOP + SLA), dukungan logistik, serta pembaruan peta risiko berbasis data per tahap.

Akar permasalahan berpusat pada fragmentasi data lintas-instansi, ketergantungan proses manual, dan kurangnya standarisasi waktu layanan untuk keputusan penting (verifikasi, pembayaran, penyelesaian sengketa). Dampaknya, outstanding 99 bidang (±Rp 38,19 miliar) bertahan, sementara 210 bidang tambahan berpotensi memperbesar kewajiban dan kompleksitas administrasi.

PEMBAHASAN

Hasil menunjukkan SPIP telah hadir dalam bentuk prosedur, *check and balance*, audit, dan monitoring. Namun, nilai tambah SPIP—yakni pengurangan risiko secara nyata dan percepatan penyelesaian kewajiban—belum sepenuhnya tercapai karena:

1. Kontrol pencegahan belum digital-terintegrasi. Tanpa *case tracking* terpadu, verifikasi, rekonsiliasi, dan pelaporan membutuhkan repetisi manual, memanjangkan siklus dan membuka celah inkonsistensi.
2. Kontrol detektif kurang berbasis risiko. Audit dan monitoring belum fokus tajam pada Tahap II & V (dua klaster dengan beban outstanding tertinggi).

3. Kontrol korektif belum ber-SLA. Sengketa/kelengkapan dokumen tidak memiliki batas waktu penyelesaian standar ($T+30/T+60$) yang mengikat lintas-instansi; dampaknya, antrean kasus menumpuk dan menular ke jadwal konstruksi.
4. Komunikasi publik kurang sistematis. Tanpa kanal formal yang mudah diakses (hotline, dasbor status, posko desa), ekspektasi warga tidak terkelola, sehingga tekanan sosial meningkat.
5. Rekomendasi Perbaikan (Prioritas 3–6 Bulan)
 - a) Tim Validasi Lahan Terpadu (TVLT) BWS–BPN–LMAN yang duduk bersama mingguan untuk *clearance* kasus dokumen/waris dan *cut-off* data yang sama; target penyelesaian 99 bidang dengan SLA $T+30/T+60$.
 - b) Digitalisasi *case tracking* lintas-instansi: satu dasbor menautkan status bidang–dokumen–nominal–sengketa–jadwal konstruksi; rekonsiliasi otomatis; *blacklist* anomali (duplikasi/nama fiktif).
 - c) *Risk-based audit* per tahap: fokus Tahap II & V; gunakan EWI (% berkas lengkap pertama, *lead time* verifikasi, jumlah sengketa aktif) sebagai pemicu audit tematik.
 - d) Strategi pembayaran prioritas di koridor strategis (akses utama, lokasi yang menjadi prasyarat mobilisasi alat) untuk menjaga *critical path*.
 - e) Komunikasi publik ber-SLA: sosialisasi rutin desa, hotline/posko dan dasbor publik status pembayaran; FAQ dan brosur alur–dokumen–timeline.
 - f) Dukungan logistik: *bundled delivery* material dan perbaikan akses sementara di titik hambatan untuk mengurangi jeda pekerjaan.

KESIMPULAN

Secara substantif, BWS NT II telah memiliki kerangka SPIP dan berbagai praktik pengendalian. Namun, efektivitasnya tereduksi oleh fragmentasi data, minimnya digitalisasi proses kunci, dan ketiadaan SLA lintas-instansi. Implementasi paket perbaikan di atas diproyeksikan menurunkan outstanding secara terukur, mempercepat *turn-around time* verifikasi–pembayaran, menyejukkan risiko sosial, dan memulihkan akuntabilitas, transparansi, serta kepercayaan publik—sejalan dengan mandat PP No. 60/2008. Jika rekomendasi dipenuhi, indikator hasil yang realistis dalam 3–6 bulan adalah: peningkatan *settlement rate* $T+30/T+60$, kenaikan *first-pass yield* kelengkapan dokumen, penurunan jumlah/nilai bidang outstanding, dan berkurangnya sengketa aktif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hardani, S.PD., M. S., Helmina Andriani, M. S., Jumari Ustiawaty, S.Si., M. S., Evi Fatmi Utami, M.Farm., A., Ria Rahmatul Istiqomah, M. I. K., Roushandy Asri Fardani, S.Si., M. P., & Dhika Juliana Sukmana, S.Si., M.ScNur Hikmatul Auliya, G. C. B. (2009). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *Advanced Drug Delivery Reviews* (Vol. 61, Issue 9).
- INDONESIA, P. P. R., & 2008, N. 60 T. (n.d.). *SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN*

REPUBLIK INDONESIA,.

IAPI (2011:319), *Sistem Pengendalian Internal dan Hubungannya Dengan Ruang Lingkup Pemeriksaan*

Inspektorat, T. P. (2019). *Buku saku SPIP Inspektorat Kota Yogyakarta Buku saku SPIP Inspektorat Kota Yogyakarta*. 22.

JURNAL DAN SKRIPSI

Lumanaw, K. ., & Tinangon, J. (2016). the Evaluation Application Information System Accounting Payroll for the Intern Control At Pt. Bpr Danaku Mapan Lestari in Bitung. *Jurnal EMBA*, Vol.4 No.2(2), 224–235.

Luthfiyah Triska Arisanti, Dra Yulinartati.,MM.,Ak.,CA, Ari Sita Nastiti., S. M. A. (2019). EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN PADA PT BUMI KARYA UTAMA JEMBER. *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember*, 11(1), 1–14.

Ridho, A. (2013). Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Dalam Rangka Mengatasi Tindak Kecurangan (studi Kasus Pada Pt Nurimas Taksi Sidoarjo). *Calyptra*, Vol. 2(No. 2), h.

Togo, A. (2024). *Pembangunan PSN Waduk Mbay-Lambo di Nagekeo Sudah Mencapai 45,18 Persen*. <https://florespos.net/2024/04/06/pembangunan-psn-waduk-mbay-lambo-di-nagekeo-sudah-mencapai-4518-persen/>

Mulyadi. 2016. *Akuntansi Manajemen Konsep, Manfaat, dan Relevansi*. Jakarta: Salemba Empat. Halaman 129 dan 163.

Aditya, R. (2021). Analisis Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Proyek Infrastruktur di Daerah. Skripsi, Universitas Gadjah Mada.

Huberman, Micheles dan Miles Matthew. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press. Jakarta

Nugroho, & Hartati. (2020). *Koordinasi Antarinstansi dan Prioritas Lokasi Strategis dalam Proyek Berbasis Lahan*. Penerbit Akademis.

Lestari, R. (2020). Evaluasi Pengendalian Internal dalam Pengelolaan Dana Proyek Infrastruktur di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(2), 134–145.

Novita Silfiani Christina, I Wayan Mundra, & Mohammad Erfan. (2020). Studi Penentuan Lengkung Debit (Rating Curve) untuk Menunjang Sistem Peringatan Dini di Daerah Aliran Sungai (DAS) Temef Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Student Journal GELAGAR*, 10(X), 1–9.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Rahmawati, A. (2018). Inspeksi Lapangan dan Efektivitas Operasional Proyek. *Jurnal Teknik Sipil Indonesia*, 5(3), 120–135.

Lina Nuryawati & Irwan Taufiq Ritonga. (2022). *Analisis Hubungan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kualitas Pengelolaan Keuangan*. Studi pada Pemerintah Daerah Di Indonesia. Tesis Magister. Magister Akuntansi.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Peraturan Republik Indonesia (2008), *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun (2008) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta : Kementrian Sekretariat Negara

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4938/pp-no-60-tahun-2008>

UU RI. (2004). UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 1–32.

2008, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN, *Lingkungan Pengendalian*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 *tentang Pengelolaan Keuangan Negara*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*

Pemerintah Republik Indonesia (2019), *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara*. Jakarta : Kementrian Sekretariat Negara.

ARTIKEL BERITA

Nulangi, T. M. (2024). *Progres Pembangunan Waduk Lambo di Nagekeo Secara Kumulatif Mencapai 52,96 Persen Artikel Ini Telah Tayang Di RakyatFlores.Com. Dengan Judul : Progres Pembangunan Waduk Lambo di Nagekeo Secara Kumulatif Mencapai 52,96 Persen 13 Juli 2024.* <https://rakyatflores.com/regional/progres-pembangunan-waduk-lambo-di-nagekeo-secara-kumulatif-mencapai-5296-persen/>

Moa, E. (2024). *Ganti Rui Lahan Belum Dibayar, Pemilik Lahan Tutup Jalan ke Waduk Lambo Nagekeo,*. TRIBUNFLORES.COM, MBAY. <https://flores.tribunnews.com/2024/02/27/ganti-rugi-lahan-belum-dibayar-pemilik-lahan-tutup-jalan-ke-waduk-lambo-nagekeo>

Konsultan Syncore Consulting. (2023). *Tahapan Pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia*. Retrieved from <https://syncore.co.id/Tahapan-Pengelolaan-Kuangan-Negara-di-Indonesia>